



HUMAS PEMPROV KALBAR

**SERAHKAN LAPORAN:** Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Aziz menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017 ke Penjabat Gubernur Kalbar, Dodi Riyadmadji dalam Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Kalbar, kemarin.

## Pemprov Enam Kali Raih WTP

PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperoleh predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017. Dengan demikian, sudah enam kali berturut-turut opini WTP dalam tata kelola keuangan

diserahkan BPK RI kepada pemprov.

Laporan Hasil Pemeriksaan ini diserahkan oleh anggota VI BPK RI, Harry Azhar Aziz ke Penjabat Gubernur Kalbar, Dodi Riyadmadji dalam Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Kalbar, kemarin.

Harry dalam laporan-

nya menyampaikan bahwa laporan Keuangan Pemprov Kalbar tahun 2017 telah sesuai Standarisasi Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang

◆ Ke Halaman 7 kolom 1



## Pemprov Enam Kali Raih WTP

Sambungan dari halaman 1

berpengaruh langsung dan material.

Selain itu, unsur-unsur sistem Pengendalian Internal (SPI), yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi, dan komunikasi serta pemantauan juga telah dirancang dan disusun. "Oleh karenanya BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017," kata Harry.

Harry menilai pencapaian opini WTP ini menunjukkan komitmen Pemprov Kalbar beserta jajarannya. "Tentu tidak terlepas sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dari dalam pelaksanaan fungsi pengawasan," jelasnya.

Kendati demikian, menurut Harry, masih ada permasalahan administrasi yang hendaknya menjadi perhatian. Seperti pengelolaan persediaan Kalbar belum sepenuhnya tertib, pengelolaan Barang Milik Daerah

Kalimantan Barat kurang memadai dan Penatausahaan Belanja Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Kalbar belum tertib.

Kemudian ada Laporan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pihak ketiga senilai Rp374,07 miliar tetapi tidak dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Tindak lanjut atas Hasil Pemeriksaan BPK berdasarkan hasil pemeriksaan sampai dengan tahun anggaran 2017, terdapat rekomendasi sebanyak 1.486 senilai Rp146,45 miliar. Atas rekomendasi tersebut, sebanyak 81 persen sudah ditindaklanjuti. Sementara sekitar 13 persen dalam proses tindak lanjut, dan 4 persen belum ditindaklanjuti. "Dua persen tak dapat ditindaklanjuti," jelasnya.

Selain itu Harry juga menyinggung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar yang dalam tiga tahun terakhir di bawah rata-rata

nasional. Harry berharap Pemerintah Provinsi Kalbar dapat melakukan upaya-upaya strategis untuk meningkatkan IPM agar lebih tinggi daripada rata-rata nasional.

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Dodi Riyadmadji mengatakan catatan yang disampaikan BPK menjadi perhatian untuk ditangani bersama. Pertama berkaitan dengan IPM. Tercatat IPM Kalbar masih di bawah rata-rata nasional. IPM Nasional berada pada angka 70 poin sedangkan Kalbar baru pada angka 66 poin.

"Ada beberapa indikator yang mempengaruhi IPM. Kalau di Kalbar berkaitan dengan sumber daya manusia memang ada catatan khusus. Baik dari anak-anak hingga usia produktif," kata jelas Dodi. Berkaitan dengan itu, Dodi berharap penduduk usia produktif bisa menghasilkan barang dan jasa sehingga tidak hanya menjadi pengonsumsi saja.

"Perangkat daerah harus mampu merangsang penduduk Kalbar untuk memperoleh pekerjaan yang layak sehingga produktivitasnya terlihat," jelas dia. Kedua,

lanjut Dodi, berkaitan dengan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan BPK. Dodi menyebutkan tindak lanjut harus diselesaikan dalam waktu 60 hari.

"Jika lewat bisa masuk ke ranah hukum. Jadi catatan khusus ini menjadi perhatian kami, kaitannya dengan penyerahan laporan hasil pemeriksaan," jelas dia.

Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah menyampaikan, DPRD bersama Pemprov Kalbar akan mempelajari bersama LHP BPK RI secara detail dan bekerja sama dalam rangka proses pengawasan dan monitoring. Ini untuk menindaklanjuti temuan atau rekomendasi BPK RI dengan tenggat waktu 60 hari. "Jelas kami harus bersinergi dengan Pemprov dan BPK RI, apa saja harus dilakukan dan menyelesaikan rekomendasi tersebut," ujarnya.

Misalnya masalah aset. Menurutnya masalah ini harus diselesaikan secara tuntas. Sebab, beberapa aspek hampir setiap tahun menjadi temuan. "Kami pasti akan bekerjasama," ucap Politisi Gerindra Kalbar ini. (den/mse)